

## Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tanah Datar

Kevin Wahyu Rizal<sup>1\*</sup>, Vita Fitria Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [kevinwrizal99@gmail.com](mailto:kevinwrizal99@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

06 Januari 2024

**Tanggal Revisi:**

26 Agustus 2024

**Tanggal Diterima:**

10 Oktober 2024

---

**Keywords:** *Accountability; Leadership; Transparency; Effectiveness of Village Fund Management.*

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Rizal, K. W., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (4), 1400-1415.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i4.1477>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

**Abstract**

*This research aims to determine the influence of accountability, leadership and transparency on the effectiveness of village fund management (Case Study in Nagari Government in North Lintau Buo District, Lintau Buo District, Sungayang District, Lima Kaum District, and Pariangan District). This research uses subject data. The sampling technique used the total sampling method with a total sample of 25 villages. Data analysis uses multiple linear regression analysis. The results of the research show that accountability, leadership and transparency have a positive and significant effect on the effectiveness of village fund management in the Nagari government of Tanah Datar agency.*

### PENDAHULUAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai batas wilayah yang telah ditetapkan. Negara ini mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengatur urusan negaranya, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan penduduknya berdasarkan kepentingan masing-masing. Selain itu, desa mempunyai hak atas asal usul dan tradisinya yang diakui dan diperhatikan oleh sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai tahun 2015, desa mulai menerima 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota masing-masing. Dana tersebut dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong kemajuan desa, dan memberikan bantuan kepada penduduk desa.

Pengelolaan dana desa sebagaimana dijelaskan oleh (Siafu et al., 2020) merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Tujuan pengelolaan keuangan desa adalah mewujudkan masyarakat maju, mandiri dan sejahtera melalui pendanaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pemberdayaan diri, dengan tetap menjaga ciri khasnya (Siafu et al., 2020). Penerapan prinsip good governance yang menuntun akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan pengelolaan uang desa yang baik. Dan jangan abaikan posisi kepemimpinan yang dipegang oleh kepala desa yang bertugas mengawasi keuangan masyarakat. (Siswo Nugroho et al., 2022).

Menurut (Dethan, 2019), efektivitas adalah kapasitas untuk menyelesaikan tugas, fungsi, operasi program, aktivitas, atau misi organisasi atau sejenisnya tanpa berada di bawah tekanan atau mengalami konflik selama pelaksanaannya. Agar tujuan yang dimaksudkan atau ditetapkan sejak awal dapat tercapai sejalan dengan praktik yang ada saat ini, efektivitas pengelolaan dana desa merupakan ukuran sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan undang-undang pengelolaan dana desa (Dethan, 2019). Berbagai teknik digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan desa, seperti: Keberhasilan pengelolaan dana desa dapat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan yang diprioritaskan dan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 2) Ketepatan waktu, tata cara pelaksanaan dan pemanfaatan, serta ketaatan terhadap jangka waktu pelaksanaan yang dijadwalkan; 3) Program masyarakat desa memberikan manfaat kepada penerima sebagaimana dimaksud; dan 4) hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat (Putra & Rasmini, 2019).

Berbagai penelitian tentang efisiensi pengelolaan dana desa telah dilakukan, dan mereka telah mengidentifikasi sejumlah elemen yang mempengaruhi efisiensinya. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi: 1) akuntabilitas, penelitian yang dilakukan oleh (Ayuandani & Muniruddin, 2022; Hindrayani & Wati, 2021; Siswo Nugroho et al., 2022; Sriani, 2021); 2) kepemimpinan, penelitian yang dilakukan oleh (Ayuandani & Muniruddin, 2022; Jurniadi et al., 2015; Sriani, 2021); 3) transparansi, penelitian yang dilakukan oleh (Hindrayani & Wati, 2021; Putra & Rasmini, 2019; Siswo Nugroho et al., 2022); 4) partisipasi masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh (Ayuandani & Muniruddin, 2022; Made Sriani, 2021; Putra & Rasmini, 2019; Siswo Nugroho et al., 2022). Obyek penelitian ini adalah instansi pemerintah desa, dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa berasal dari instansi pemerintah desa itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi. Penelitian ini berfokus pada ketiga faktor tersebut yang digunakan sebagai variabel. Frasa “pertanggungjawaban” mengandung arti bahwa setiap tindakan yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaporkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses penganggaran harus dilaporkan dengan benar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat dari awal hingga akhir jika pemerintah ingin bertanggung jawab kepada rakyat. Akuntabilitas yang efektif dimungkinkan ketika informasi yang diberikan jelas. agar konsumen memiliki akses informasi keuangan yang akurat dan nyaman. Hak untuk mengakses informasi keuangan pemerintah untuk tujuan penilaian pemerintah ada karena publik adalah pihak yang menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk menangani keuangan publik. (Mardiasno, 2002).

Akuntabilitas desa adalah upaya untuk menciptakan dan memelihara rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta proses untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah desa di depan masyarakat. Akuntabilitas mencakup kepatuhan terhadap undang-undang, lingkungan tempat organisasi beroperasi, masyarakat, dan pemerintah selain kewajiban keuangan formal dari suatu lembaga pemerintah. Agar pengelolaan uang desa dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa akan lebih efektif. (Putra & Rasmini, 2019).

Menurut studi (Ayuandani & Muniruddin, 2022), akuntabilitas memiliki dampak yang baik dan cukup besar terhadap seberapa baik desa mengelola uang mereka. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas meningkatkan efisiensi

pengelolaan uang desa (Putra & Rasmini, 2019). Menurut penelitian (Sriani, 2021) akuntabilitas meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian (Hindrayani & Wati, 2021) akuntabilitas juga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, menurut penelitian (Latif & Savitri, 2021), akuntabilitas meningkatkan efisiensi pengelolaan uang desa. Temuan dari berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa semakin akuntabel pemerintah desa, semakin efektif pengelolaan keuangan desa.

Kepemimpinan merupakan komponen kedua yang mempengaruhi efektivitas manajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kepemimpinan harus berusaha membujuk orang lain (Robbin & Judge, 2015). Peran desa dalam kepemimpinan sangat penting karena desa yang kuat berawal dari pemimpin yang baik dalam memimpin. Masyarakat akan mendukung dan membantu pemerintah melaksanakan proyek-proyek pembangunan dengan lebih berhasil jika pegawai pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dan pemahaman yang lebih baik tentang kepentingannya. Gaya kepemimpinan yang terbuka atau transparan yang terbuka terhadap segala aktivitas atau kegiatan merupakan gambaran pemimpin yang baik. sehingga perlu adanya kepemimpinan dalam pengelolaan pendapatan desa (Made Sriani, 2021).

Menurut hasil penelitian (Ayuandani & Muniruddin, 2022) kepemimpinan berdampak positif terhadap efisiensi pengelolaan uang desa. Hal ini sesuai dengan penelitian (Made Sriani, 2021) yang menunjukkan kepemimpinan yang kompeten meningkatkan efisiensi penanganan uang desa. Akibatnya, bagaimana pemimpin mengerahkan sumber daya manajemen di dalam organisasi yang dipimpinnya sangat mempengaruhi aktivitas dan dinamika organisasi. Konsekuensinya, organisasinya akan semakin aktif, dan akan semakin banyak kegiatan yang dilakukan.

Tingkat transparansi berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan keuangan di masyarakat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam Peraturan Nomor 13 Pasal 4 Ayat 7 menyebutkan bahwa Keterbukaan adalah sarana yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan akses yang diperlukan untuk menjamin kelancaran Sistem Pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Lari cepat. Institusi yang berhasil menerapkan sistem transparansi dapat berdampak pada besarnya kepercayaan masyarakat terhadap berjalannya organisasi atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Selain menawarkan layanan publik yang terlihat, dapat diakses, dan dipahami oleh semua orang yang mencari informasi ini.

Menurut penelitian yang dilakukan (Putra & Rasmini, 2019), kepedulian meningkatkan efisiensi pengelolaan uang desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menemukan bahwa tirai meningkatkan efisiensi penanganan uang desa (Hindrayani & Wati, 2021). Menurut studi (Latif & Savitri, 2021), keterbukaan meningkatkan cara pengelolaan keuangan desa. Transparansi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan uang desa yang didukung oleh penelitian (Siswo Nugroho et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan uang desa akan lebih efektif jika lebih transparan.

Ideologi babaliak ka nagari (kembali ke nagari), atau kembali ke identitas lokal dan komunitas politik yang terdesentralisasi, digunakan untuk mendirikan pemerintahan desa di Propinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Desa dan Nagari merupakan tingkat pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Nagari berperan penting dalam membantu keberhasilan pemerintah pusat dan berada di depan dalam pencapaian program-program keberhasilan pemerintah. Nagari, atau dusun, merupakan representasi miniatur pusat pemerintahan. Sesuatu dimulai dengan sesuatu yang kecil dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar sehingga penduduk desa dapat melihat perkembangan dan kekayaan suatu bangsa. Itu akan bergantung pada uang yang diberikan oleh pemerintah federal untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran. Melalui prakarsa pemerintah, uang tunai diberikan kepada nagari, atau

desa, di seluruh wilayah Indonesia. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tanah Datar adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, dengan Batusangkar sebagai pusat administratifnya. Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 Nagari, dan 395 Jorong. Distrik Lintau Buo, kadang-kadang disebut sebagai Lintau XI koto (9 Nagari), memiliki arti penting sebagai sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2003, pemekaran ini diperluas dan dimekarkan menjadi dua kabupaten: Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Lintau Buo Utara. Distrik Lintau Buo Utara terdiri dari lima Nagari: Nagari Batu Bulek, Tanjung Bonai, Balai Tengah, Tapi Selo, dan Lubuk Jantan. Terdapat empat desa yaitu Nagari Buo, Pangian, Tigo Jangko, dan Taluak yang terletak di Kecamatan Lintau Buo.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah kabupaten Tanah Datar tentang Dana Bantuan Keuangan ke Nagari Tahun Anggaran 2022. Kabupaten Tanah Datar menerima dana sebesar Rp.64.919.594.000,- yang dibagikan ke 75 Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Lintau Buo yang terdiri dari 9 Nagari mendapatkan Dana Nagari yang berjumlah Rp.8.384.358.000,- Dengan data pembagian pada masing-masing nagari sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Distribusi Dana Nagari**

No	Nagari	Dana Nagari (APBN)
1	Batu Bulek	Rp 1,174,252,000
2	Balai Tengah	Rp 819,031,000
3	Tanjung Bonai	Rp 1,151,051,000
4	Lubuk Jantan	Rp 1,046,777,000
5	Tapi Selo	Rp 830,708,000
6	Buo	Rp 741,951,000
7	Pangian	Rp 795,613,000
8	Tigo Jangko	Rp 905,627,000
9	Taluak	Rp 919,348,000
<b>Total</b>		<b>Rp 8,384,358,000</b>

*Sumber: Surat Sekda Kabupaten Tanah Datar, 2022*

Berasal dari pendapatan yang diperoleh masing-masing nagari di Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan pemerintahan mandiri Nagari yang bertanggung jawab, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2022. Kebijakan ini mengatur tentang tata kelola uang nagari dan menetapkan pedoman pengelolaan sumber daya nagari sedemikian rupa sehingga bersifat terbuka, bertanggung jawab, dan inklusif. dilaksanakan dengan ketelitian yang sistematis. Hambatan perdagangan. Untuk menggagalkan kemampuan seorang pemimpin dalam menggelapkan dana, melakukan pencurian, dan menggunakan kekuasaannya.

Banyak kasus penyelewengan dana nagari yang terjadi di nagari yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya kasus yang sedang hangat pada akhir tahun 2021 lalu di Nagari Sungai Jambu yang terletak di Kecamatan Pariangan. Kasus yang menjerat 2 Perangkat Nagari Pj. Wali Nagari dan Bendahara Nagari Sungai Jambu yang telah melakukan pemalsuan rekening koran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan nagari Sungai Jambu, sehingga merugikan keuangan negara yang telah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah Rp.745.889.435,00 (*Delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima*

*rupiah tujuh ratus empat puluh lima juta*). Dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi di Nagari-nagari lainnya.

Maraknya korupsi dan penyelewengan dana nagari di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kurangnya akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga memungkinkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi yang merugikan negara. Karena terdapat kasus penyelewengan dana desa dan masih rendahnya tingkat realisasi dana desa di Kabupaten Tanah Datar serta minimnya penerapan prinsip pengelolaan dana desa sehingga efektivitas dari pengelolaan dana desa tersebut belum maksimal pencapaiannya.

Beberapa elemen, termasuk akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi, telah diidentifikasi mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dari berbagai fenomena tersebut di atas, yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian. Kajian ini merupakan adaptasi dari kajian tersebut. (Rasmini, 2019) yang mempelajari “Efek akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.” Di sini peneliti mengeliminasi 1 variabel independen yaitu partisipasi masyarakat karena tidak berkaitan dengan unsur-unsur yang mempengaruhi seberapa baik lembaga pemerintah desa mengelola kas. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan satu komponen lagi yaitu kepemimpinan. (Sriani, 2021) Ini mengklaim bahwa kepemimpinan meningkatkan efisiensi penanganan keuangan desa. Demikian juga mengalihkan fokus kajian ke Nagari di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Selatan. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara signifikan, yang tentunya akan meningkatkan efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola uang desa.

## **REVIUW LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### ***Agency Theory***

Dalam teori keagenan, pemilik berfungsi sebagai *principal* dan manajer berfungsi sebagai *agent*. Pihak *principal* adalah orang yang mengarahkan pihak lain, terutama agen, untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh prinsipal saat bertindak dalam kapasitas pengambilan keputusan. Hubungan pada pemerintahan desa berarti memberi wewenang terhadap *agent* untuk melakukan tugas dengan tanggung jawab (Donaldson et al., 1991).

### **Akuntabilitas**

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah setiap keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang. Pemerintah Indonesia menggunakan jenis akuntabilitas tertentu yang disebut akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan mengacu pada jenis akuntabilitas yang digunakan oleh organisasi pemerintah untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif, ekonomis, dan efisien sambil mencegah korupsi dan kebocoran uang. (Putra & Rasmini, 2019).

### **Kepemimpinan**

Upaya atau keterampilan kepemimpinan adalah kapasitas untuk membujuk orang lain atau kelompok untuk bekerja menuju tujuan bersama. Seseorang yang menggunakan posisi otoritasnya untuk melakukan kontrol atau pengawasan atas orang lain dikenal sebagai pemimpin. (Robbin & Judge, 2015)

## **Transparansi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 4 Ayat 7 tentang pengelolaan keuangan desa, transparansi merupakan salah satu strategi agar keberadaan suatu instansi diketahui oleh masyarakat luas. memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memahami bagaimana tata kelola dan sistem manajemen keuangan dioperasikan. Setiap organisasi yang berinteraksi dengan masyarakat umum atau masyarakat harus menunjukkan bahwa publik menerima informasi atau mengungkapkannya sebagai sarana pengawasan terhadap lembaga tersebut.

## **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

Mencapai maksud atau tujuan yang ditentukan untuk setiap organisasi, kegiatan, atau program membutuhkan efektivitas. Maksud atau tujuan dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan, kegiatan, atau program organisasi atau lembaga dapat dinilai dengan menggunakan konsep kemanjuran. Dethan (2019) mengartikan efektivitas dalam pengertian ini sebagai pencapaian tujuan organisasi dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, yang mencakup input, proses, dan output. Manajemen adalah aktivitas yang disengaja dan bertujuan yang dilakukan oleh individu atau kolektif untuk mencapai tujuan tertentu. Semua pihak yang terkait dengan keuangan masyarakat, terutama perangkat desa, harus mengetahui dan memahaminya. Agar keuangan desa transparan dan akuntabel, komponen ini diperlukan.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolana Dana Desa**

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pertanggungjawaban adalah tata cara yang mengamanatkan bahwa segala keputusan yang diambil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan undang-undang. Segala sesuatu mulai dari tahap perencanaan awal hingga akuntansi akhir harus dipertanggungjawabkan. Atas dasar konsep ini, pemerintah desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada penduduk dan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>**: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

Kepemimpinan menjadi peran penting bagi suatu desa, dikarenakan suatu desa yang baik berawal dari pemimpin yang baik dalam memimpin. Kepemimpinan adalah upaya membujuk orang lain untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan oleh masyarakat dan pemerintah bergantung pada pemahaman aparat pemerintah terhadap kepentingan masyarakat dan tingkat kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. (Robbin & Judge, 2015).

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>** : Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

Yang unik, menurut Pasal 4 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13, adalah bagaimana sebuah lembaga dapat diakses oleh publik agar masyarakat dapat mengetahui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. dan rencana pengeluarannya. (Siswo Nugroho dkk., 2022). Kepercayaan publik terhadap efektivitas organisasi pemerintah dan non-pemerintah dapat dipengaruhi oleh penerapan sistem transparansi yang kuat. Dan menyediakan layanan publik yang transparan, tersedia secara

bebas, dan dapat dipahami oleh siapa saja yang membutuhkannya. Sehingga dapat mengajak masyarakat untuk lebih percaya pada kinerja pemerintah desa, sehingga keuangan desa dapat lebih efisien dibelanjakan.

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>** : Transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi kausal. Investigasi kausal merupakan hal mendasar dalam metodologi penyelidikan ilmiah. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel tertentu mempunyai pengaruh kausal terhadap variabel lain (Uma Sekaran, 2017)

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang diteliti meliputi Pemerintahan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan strategi pengambilan sampel yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 25 desa, dengan masing-masing desa berjumlah 8 responden, sehingga total responden penelitian adalah 200 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Pemberian kuesioner melibatkan penyajian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada individu untuk dibalas. Pernyataan dan pilihan respons dimodifikasi agar selaras dengan variabel yang dinilai. Kuesioner diberikan kepada responden dan kemudian diambil setelah diisi oleh responden, paling lambat 1 minggu setelah penyerahan atau sesuai jangka waktu yang disepakati dengan responden.

### **Variabel penelitian dan pengukuran**

Penelitian ini fokus pada penilaian efektivitas pengelolaan dana desa, dengan variabel terikatnya adalah efektivitas pengelolaan tersebut. Faktor independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Transparansi. Langkah-langkah dalam penelitian ini dinilai menggunakan skala Likert yang terdiri dari empat pilihan respons, masing-masing diberi nilai berkisar antara 4 hingga 1: Sangat Setuju (skor 4), Setuju (skor 3), Tidak Setuju (skor 2), Sangat Tidak Setuju (skor 1).

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk meramalkan keadaan (baik positif atau negatif) dari variabel terikat, mengingat dua atau lebih variabel bebas sebagai faktor prediktor diubah (baik dinaikkan atau diturunkan nilainya). Sugiono (2015) menyatakan analisis ini dilakukan ketika model regresi mencakup minimal dua variabel independen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini mencakup total 25 desa yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. Masing-masing sampel berjumlah 8 responden, antara lain Walikota Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Keuangan, Kepala Perencanaan, Kepala Tata Usaha & Umum, Kepala Pemerintahan, Kepala Kesejahteraan, dan Kepala Pelayanan. Setiap desa sampel berjumlah 8 responden, sehingga total responden untuk penelitian ini adalah 200 orang. Sebanyak 200 responden kembali dan menyelesaikan survei. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memproses 200 survei. Kuesioner diserahkan langsung dan dikumpulkan segera dari masing-masing responden.

## Statistik Deskriptif

Tujuan mendeskripsikan variabel-variabel penelitian adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dari setiap variabel yang akan diteliti.

**Tabel 2**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	200	36.04	3.588
Kepemimpinan	200	31.53	3.442
Transparansi	200	14.27	1.625
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	200	28.13	3.085
Valid N (listwise)	200		

*Sumber: Hasil pengelolaan data penelitian, 2023*

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 200 responden dari 25 Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Variabel akuntabilitas mempunyai mean sebesar 36,04 dan standar deviasi sebesar 3588. Kepemimpinan ditandai dengan nilai rata-rata sebesar 31,53 dan standar deviasi sebesar 3,442. Variabel Transparansi mempunyai nilai mean sebesar 14,27 dengan standar deviasi sebesar 1,625. Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa mempunyai nilai rata-rata sebesar 28,13 dan standar deviasi sebesar 3,085.

## Uji Validitas dan Realiabilitas Penelitian

### Uji Validitas

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas untuk memastikan reliabilitas setiap item kuesioner yang disebarkan kepada sampel sebanyak 200 partisipan. Untuk menilai keabsahan data dilakukan perbandingan antara nilai r hitung dan r tabel. Suatu item kuesioner dapat dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Pada penelitian ini nilai r tabel dihitung dengan menggunakan  $N = 200$  pada taraf signifikansi 5% dan  $df = N - 2 = 198$ ; oleh karena itu,  $r\text{-tabel} = 0,1388$ .

**Tabel 3**  
**Uji Validitas**

Variabel	Item Angket	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	1	0,69	0,1388	Valid
	2	0,68	0,1388	Valid
	3	0,74	0,1388	Valid
	4	0,72	0,1388	Valid
	5	0,67	0,1388	Valid
	6	0,60	0,1388	Valid
	7	0,72	0,1388	Valid
	8	0,72	0,1388	Valid
	9	0,69	0,1388	Valid
	10	0,715	0,1388	Valid
Kepemimpinan (X2)	1	0,66	0,1388	Valid
	2	0,71	0,1388	Valid
	3	0,73	0,1388	Valid

	4	0,64	0,1388	Valid
	5	0,78	0,1388	Valid
	6	0,78	0,1388	Valid
	7	0,71	0,1388	Valid
	8	0,70	0,1388	Valid
	9	0,66	0,1388	Valid
Transparansi (X3)	1	0,76	0,1388	Valid
	2	0,84	0,1388	Valid
	3	0,87	0,1388	Valid
	4	0,77	0,1388	Valid
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	1	0,7	0,1388	Valid
	2	0,7	0,1388	Valid
	3	0,7	0,1388	Valid
	4	0,8	0,1388	Valid
	5	0,8	0,1388	Valid
	6	0,8	0,1388	Valid
	7	0,7	0,1388	Valid
	8	0,7	0,1388	Valid

Sumber: Hasil pengelolaan data penelitian, 2023

### Uji Reliabilitas

Setelah validitas setiap item kuesioner penelitian dinilai dan dianggap memuaskan, maka reliabilitas pernyataan yang dinyatakan valid dievaluasi. Pernyataan ini dapat dianggap andal jika nilai item Cronbach alpha melebihi 0,60. Nilai Alpha yang semakin tinggi (mendekati 1) menunjukkan keandalan yang semakin besar. Hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap variabel: akuntabilitas (X1), kepemimpinan (X2), transparansi (X3), dan efektivitas pengelolaan dana desa (Y).

**Tabel 4**  
Nilai Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,878	0,60	Reliabel
X2	0,873	0,60	Reliabel
X3	0,824	0,60	Reliabel
Y	0,888	0,60	Reliabel

Sumber: hasil pengolahan data penelitian, 2023

### Hasil penelitian

#### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 5**  
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,795	1,464		1,910	,058		
	Total X1	,284	,060	,330	4,745	<,001	,410	2,440
	Total X2	,214	,059	,239	3,609	<,001	,455	2,198
	Total X3	,585	,125	,308	4,668	<,001	,456	2,193

a. Dependent Variable: Total Y

Sumber: hasil pengolahan data penelitian, 2023

Pada Tabel 5 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:  $Y = 2,795 + 0,284X_1 + 0,214X_2 + 0,585X_3$ . Konstanta persamaan regresi linier berganda adalah 2,795. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dianggap konstan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien variabel Tanggung Jawab ( $X_1$ ), Kepemimpinan ( $X_2$ ), dan Transparansi ( $X_3$ ) secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa ( $Y$ ). Koefisien regresi variabel Akuntabilitas sebesar 0,284 menunjukkan bahwa peningkatan Akuntabilitas satu satuan akan mengakibatkan peningkatan pengelolaan dana desa sebesar 28,4%. Akuntabilitas berkorelasi positif dengan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Koefisien regresi Kepemimpinan adalah sebesar 0,214 yang menunjukkan bahwa peningkatan variabel Kepemimpinan akan menyebabkan peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 0,214 (21,4%). Kepemimpinan mempunyai korelasi positif sedang dengan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Koefisien regresi transparansi sebesar 0,585 yang berarti bahwa peningkatan pada variabel transparansi akan menyebabkan peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 0,585 (58,8%). Transparansi mempunyai korelasi positif dengan keberhasilan penyelenggaraan keuangan desa.

### Uji F (*F Test*)

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan merupakan model tetap.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	962.220	1	962.220	204.496	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	931.655	198	4.705		
	Total	1893.875	199			

a. Dependent Variable: Total\_Y  
b. Predictors: (Constant), Total\_X1

*Sumber: hasil pengolahan data penelitian, 2023*

Tabel hasil uji F menunjukkan bahwa nilai p-value akuntabilitas ( $X_1$ ), kepemimpinan ( $X_2$ ), dan transparansi ( $X_3$ ) terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa ( $Y$ ) adalah sebesar 0,001, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 102,373 lebih besar dari nilai F kritis sebesar 2,65. Hal ini menunjukkan penolakan terhadap  $H_0$  dan penerimaan  $H_a$ . Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas ( $X_1$ ), Kepemimpinan ( $X_2$ ), dan Transparansi ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap efisiensi pengelolaan dana desa ( $Y$ ).

### Uji t (*t-test*)

Hasil uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai p lebih dari 0,05 atau nilai t observasi lebih kecil dari nilai t kritis, maka hipotesis ditolak, yang menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan secara statistik. Namun jika nilai p lebih kecil dari 0,05 atau nilai t observasi lebih besar dari nilai t kritis, maka hipotesis diterima yang menunjukkan koefisien regresi signifikan.

**Tabel 7**  
**Analisis Uji Hipotesis**

Uji T Coefficients <sup>a</sup>			
Model	T	Sig.	Hasil Hipotesis Diterima/Tidak Diterima
1 (Constant)	5.015	.000	
Akuntabilitas	14.300	.001	Diterima
Kepemimpinan	12.782	.001	Diterima
Transparansi	13.638	.001	Diterima

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

*Sumber: Data primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan analisis data statistik yang diolah, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat sebagai berikut.:

- a) Berdasarkan tabel hasil uji t di atas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Selain itu nilai thitung sebesar 14,300 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,972. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai dampak yang cukup besar terhadap efisiensi pengelolaan dana desa. (**Hipotesis 1 diterima**)
- b) Berdasarkan tabel hasil uji t yang diberikan dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Nilai signifikansinya adalah 0,001, kurang dari ambang batas 0,05. Selain itu nilai t hitung sebesar 12,782 lebih besar dari nilai t kritis sebesar 1,972. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (**Hipotesis 2 diterima**)
- c) Dari tabel hasil uji t diatas dapat ditentukan bahwa nilai signifikansi variabel transparansi (X3) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa adalah  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 13,638 > t_{tabel} 1,972$ . Dapat disimpulkan transparansi mempunyai dampak yang cukup besar terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. (**Hipotesis 3 diterima**)

#### Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R Square*

Uji determinasi *Adjusted R Square* digunakan ketika terdapat beberapa variabel independen dalam penelitian, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.781 <sup>a</sup>	.610	.604	1.940	1.711

a. Predictors: (Constant), Total\_X3, Total\_X2, Total\_X1  
b. Dependent Variable: Total\_Y

*Sumber: hasil pengolahan data penelitian, 2023*

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Adjusted R Square sebesar 0,604 atau setara dengan 60,4%. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Akuntabilitas,

Kepemimpinan, dan Transparansi mempunyai pengaruh signifikan sebesar 60,4% terhadap variabel dependen Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Sisanya sebesar 39,65% pengaruhnya disebabkan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari.**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil uji statistik t menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Selain itu nilai  $t_{hitung}$  sebesar 14,300 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,972. Koefisien beta ( $\beta$ ) akuntabilitas bernilai positif yaitu 0,613 atau 61,3%.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya dampak akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan oleh perangkat desa, maka semakin besar pula efektivitas pengelolaan dana desa. Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang efektif, pemerintah desa harus menunjukkan akuntabilitas dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa yang kompeten. Setiap anggaran dana nagari dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang relevan untuk mencegah segala risiko yang terkait dengan korupsi dan kolusi. Hal ini memastikan bahwa semua pemerintah desa mematuhi hukum dan secara efektif memenuhi tujuan masing-masing nagari. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu kegiatan berkorelasi langsung dengan tercapainya efisiensi pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistic t yang menunjukkan bahwa nilai signifikan  $0,001 < 0,05$  serta nilai  $t_{hitung}$  12,782  $> t_{tabel}$  1,972 dengan nilai koefisien beta ( $\beta$ ) akuntabilitas bernilai positif yaitu sebesar 0,603 atau 60,3%.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa yang kompeten. Setiap anggaran dana nagari dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang relevan untuk mencegah segala risiko yang terkait dengan korupsi dan kolusi. Hal ini memastikan bahwa semua pemerintah desa mematuhi hukum dan secara efektif memenuhi tujuan masing-masing nagari. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu kegiatan berkorelasi langsung dengan tercapainya efisiensi pengelolaan dana desa. Karena kepemimpinan dalam mengambil kebijakan mempengaruhi tujuan dari pemerintahan desa itu sendiri sehingga dapat menentukan tercapai atau tidak efektivitas dalam pengelolaan dana desa tersebut. Tanpa adanya pemimpin dalam suatu organisasi atau pemerintahan maka kebijakan yang diambil pun sulit untuk di putuskan, karna dalam organisasi atau instansi harus memiliki leader atau seorang pimpinan yang memiliki sifat kepemimpinan sehingga tujuan dari suatu organisasi atau instansi dapat tercapai sehingga efektivitas pengelolaan dana desa terwujud.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuandani & Muniruddin (2022) dan Made Sriani (2021) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan terhadap efektivitas pengelolaan dana

desa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan wali nagari dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi pengelolaan dana desa, karena seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang besar terhadap bawahan atau pejabat nagarinya, sehingga dapat membina kolaborasi dan memastikan keberhasilan pengelolaan dana desa yang efektif.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari.**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi mempunyai dampak penting dan menguntungkan terhadap efisiensi pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistic t yang menunjukkan bahwa nilai signifikan  $0,001 < 0,05$  serta nilai  $t_{hitung} 13,638 > t_{tabel} 1,972$ .

Tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana transparansi berdampak pada efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan temuan kajian peneliti, tingkat transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pengelolaan dana desa. Hal ini berarti ketika aparat desa mengedepankan transparansi, maka pengelolaan dana desa akan menjadi lebih baik dan efektivitasnya pun meningkat. Transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penipuan dan memberikan tanggung jawab dalam pelaporan pengelolaan dana desa. Untuk memastikan transparansi yang efektif dalam pengelolaan dana desa, penting untuk membangun sistem yang mendorong keterbukaan dan kemudahan akses informasi selama pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh aparat desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pemerintahan Nagari di Kabupaten Tanah Datar, rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa persentase tertinggi yaitu 92% menunjukkan adanya musyawarah mengenai pemanfaatan uang Nagari. Rata-rata peringkat transparansi tergolong sangat baik dengan Total Contrast Ratio (TCR) sebesar 89,18%. Transparansi nagari di Kabupaten Tanah Datar berdampak signifikan terhadap efisiensi pengelolaan anggaran desa, dan pemerintah nagari terbuka terhadap keterlibatan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan tanggapan partisipan yang menunjukkan persetujuan atau sangat setuju terhadap setiap pernyataan yang disampaikan. Hal ini juga dibuktikan oleh nagari lain yang memasang papan informasi yang merinci rencana program dan anggaran yang dialokasikan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019), (Hindrayani & Wati, 2021), (Latif & Savitri, 2021), dan (Siswo Nugroho et al., 2022), yang menunjukkan bahwa transparansi memiliki dampak penting dan menguntungkan pada kemandirian. Pengelolaan dana daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan transparansi. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendapatan desa oleh pemerintah nagari dan memitigasi potensi penyalahgunaan wewenang oleh perangkat nagari.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tanah Datar maka dapat disimpulkan bahwa: Adanya akuntabilitas mempunyai dampak penting dan bermanfaat terhadap efisiensi pengelolaan dana desa di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan akuntabilitas pemerintahan nagari berkorelasi langsung dengan efisiensi pengelolaan dana desa di lingkungan pemerintahan

nagari. Kehadiran kepemimpinan yang baik sangat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa di Kabupaten Tanah Datar. Kemanjuran pengelolaan dana desa di pemerintahan nagari berbanding lurus dengan kualitas kepemimpinan di pemerintahan yang sama. Hadirnya transparansi sangat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa di Kabupaten Tanah Datar. Meningkatkan keterbukaan dalam pemerintahan nagari akan secara signifikan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa dalam pemerintahan yang sama.

### **Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berupaya untuk membangun dan melaksanakan penelitian ini dengan cermat, masih banyak keterbatasan yang melekat dalam penelitian ini: Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penggunaan kuesioner ini dapat memberikan tanggapan yang bias dari peserta karena kurangnya kesungguhan dan kecenderungan ketidakjujuran dalam mengungkapkan sentimen mereka dalam menanggapi pertanyaan kuesioner. Banyaknya responden yang terkumpul setidaknya mengurangi tingkat keterwakilan pegawai pemerintah di nagari. Penelitian ini secara eksklusif berfokus pada pejabat pemerintah nagari di Kabupaten Tanah Datar, sehingga membatasi kemampuannya untuk menawarkan pemahaman komprehensif atau menggeneralisasi temuan ke daerah lain.

### **Saran**

Pemerintah desa di Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan keuangan desa dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang transparan, agar efektivitasnya tercapai. Untuk menjamin keutuhan penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan observasi langsung terhadap subjek penelitian, guna meminimalisir potensi bias yang mungkin timbul akibat penggunaan kuesioner. Melakukan wawancara adalah pendekatan optimal untuk memastikan keterlibatan responden yang lebih tinggi dan memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Peneliti masa depan disarankan untuk memasukkan lebih banyak faktor penelitian di luar yang telah diselidiki. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang ini, meningkatkan jumlah referensi, dan memperluas cakupan penelitian untuk mencakup sektor pemerintah lainnya serta sektor swasta.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Ayuandani, K., & Muniruddin, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2), 299–307.
- Brenya Bonsu, A., Appiah, K. O., Gyimah, P., & Owusu-Afriyie, R. (2022). Public sector accountability: do leadership practices, integrity and internal control systems matter? *IIM Ranchi Journal of Management Studies*. <https://doi.org/10.1108/irjms-02-2022-0010>
- Dethan, M. A. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add): Suatu Pendekatan Teoritis* (Vol. 7, Issue 1).

- Donaldson, L., Davis, J. H., Argyris, C., Chandler, A., Etzioni, A., Hage, J., McCloskey, D., Olson, M., Perrow, C., Tricker, R., & Whetten, D. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. In *Australian Journal of Management* (Vol. 16).
- Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, I., Maulana Putra, C., & Gede Made Artha Dhamakarja. (2020). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*.
- Harahap, F. B., Junita, A., & Meutia, T. (2020). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Pada Tujuan Sebagai Variabel Moderasi*. 4(1).
- Hindrayani, N. L. P., & Wati, N. W. A. E. W. (2021). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
- Jurniadi, Djumadi, & Paranoan.DB. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*.
- Kusuma Wardani, D., & Ranika Putri Utami, R. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Jurnal Kajian Bisnis*, 35–50.
- Latif, A., & Savitri, E. (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Effect Of Accountability, Tranparency And Quality Of Human Resource On Village Financial Management (Empirical Study On Village Government In Solok Regency, West Sumatra). In *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 2). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Made Sriani, N. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. <https://bali.tribunnews.com>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Premanda, N. L. P. U., & Latrini, N. M. Y. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putu Julianto, I., & Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, G. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 4, Issue 1).
- Robbin & Judge. (2015). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Salemba Empat.
- Siafu, O., Rawung, S. S., & Kawulur, A. F. (2020). *Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Bololo Desa, Kecamatan Wasile Utara, Kabupaten Halmahera Timur*.
- Siswo Nugroho, P., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Pajak*.
- Sriani, N. M. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. <https://bali.tribunnews.com>
- Sugista, R. A. (2017). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa*.

- Syarifuddin, A., Burhanuddin, & Iqbal. (2019). *Analisis Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan, Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.*
- Uma Sekaran, R. B. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis.* Salemba Empat.